



Disonansi Kognitif Penerima Money Politic

Akhmad Zhauqi Thahir¹, Suryanto²

^{1,2}Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: akhmad.zhauqi.thahir-2023@psikologi.unair.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-04	In the political environment, money politics is often a serious problem that affects the democratization process. This study aims to describe the phenomenon of cognitive dissonance experienced by individuals who receive funds or financial rewards in the political context, especially in the context of elections. Cognitive dissonance refers to mental conflict or feelings of discomfort that arise when a person has conflicting beliefs or values. This research uses a qualitative research method with a Grounded Theory approach, Data extraction is done by interview, The data analysis technique used is a theory driven analysis technique where themes are developed with indicators or things that support the theory by interviewing individuals who have received political money or financial assistance from political candidates or political parties. This research has important implications for understanding the dynamics of local politics and the factors of money politics recipients, which tarnish the integrity and quality of democracy. This research has important implications for understanding the dynamics of local politics and the factors of recipients of money politics, which tarnish the integrity and quality of democracy. The results of this study describe the recipients of money politics are aware of their behavior that is not in line with their values and choices, with economic factors and consider political moments as a livelihood. This research designs a more effective policy approach in addressing money politics and reducing cognitive dissonance among recipients of political funds.
Keywords: <i>Cognitive Dissonance;</i> <i>Money Politics;</i> <i>Democracy;</i> <i>Political Values.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-04	Dalam lingkungan politik, money politik seringkali menjadi masalah serius yang mempengaruhi proses demokratisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena disonansi kognitif yang dialami oleh individu yang menerima dana atau imbalan finansial dalam konteks politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Disonansi kognitif merujuk pada konflik mental atau perasaan tidak nyaman yang timbul ketika seseorang memiliki keyakinan atau nilai-nilai yang bertentangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory, Penggalan data dilakukan dengan wawancara, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis theory driven dimana tema dikembangkan dengan indikator atau hal-hal yang mendukung teori dengan mewawancarai individu yang pernah menerima money politic atau bantuan finansial dari kandidat politik atau partai politik. Penelitian ini memiliki implikasi yang penting untuk memahami dinamika politik lokal dan faktor-faktor penerima money politic, yang mencoreng integritas dan kualitas demokrasi. Hasilnya penelitian ini mendeskriptifkan penerima sadar atas perilakunya yang tidak sejalan dengan nilai dan pilihan dimiliki, dengan faktor ekonomi dan menganggap momen politik sebagai mata pencarian. Penelitian ini merancang pendekatan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi money politic dan mengurangi disonansi kognitif di antara para penerima dana politik.
Kata kunci: <i>Disonansi Kognitif;</i> <i>Money Politic;</i> <i>Pemilihan Umum;</i> <i>Demokrasi Nilai Politik.</i>	

I. PENDAHULUAN

Preferensi politik dan keyakinan membentuk identitas politik serta cara individu memandang berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi dan kepuasan terhadap kondisi negara. Individu menentukan pilihan politik mereka pada saat pemilu dan turut memengaruhi hasil kebijakan publik. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai bagaimana dan mengapa seseorang mengubah pandangan politiknya menjadi sangat penting

bagi perkembangan ekonomi dan posisi mereka dalam masyarakat (Burszty et al., 2020; Gentzkow & Shapiro, 2011; Hartmann et al., 2022; Lergetporer et al., 2018). Indonesia seperti banyak negara lain, menghadapi masalah serius yaitu money politic dalam proses pemilihan umum dan politik secara umum (Amatahir, 2023). Penerimaan uang Politik dapat menjadi bagian dari praktik yang meluas dan diterima dalam masyarakat, sehingga menimbulkan

pertanyaan etika dan moral nilai demokrasi itu sendiri (Yasin & Kadji, 2025) Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi warga negara yang cerdas dan informan dalam pengambilan keputusan politik (Yuspita Widiyaningrum, 2020) money politic dapat mengganggu integritas proses demokrasi dengan mempengaruhi cara individu membuat keputusan politiknya (Cornelia et al., 2024). Salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi selama pemilu adalah banyaknya praktik money politic. Money politic dianggap sebagai praktik yang merusak demokrasi, bahkan pada saat ini money politic sering terjadi selama masa pemilu, sepertinya harus dilakukan oleh setiap calon pejabat di tingkat daerah dan pusat untuk mendapatkan suara dan dukungan terbesar dari masyarakat, jika hal ini terus berlanjut begitu saja, itu tidak menutup kemungkinan bahwa fakta politik uang akan menjadi tradisi atau budaya dalam pemilihan itu sendiri, sehingga mencerminkan makna dan arti demokrasi yang sebenarnya (Feinig, 2020). Sebuah penelitian dari Zen (2015) menunjukkan bahwa modal keuangan yang dimiliki oleh kandidat kepala dan wakil kandidat biasanya merupakan kombinasi uang pribadi dan bantuannya dari donator politik yaitu pengusaha. Money politic dalam masyarakat sendiri terlihat bahwa penerima Money politic dijadikan ajang mencari penghasilan (Nabila et al., 2020). Masyarakat awam tidak mempedulikan nilai-nilai demokrasi, bagi mereka yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang atau barang dengan cara mudah. Dari perspektif ekonomi Hamid & Edy (2004) menyatakan bahwa penilaian politik kuang muncul karena adanya hubungan simbiosis antara pihak yang bertindak (partai, politisi, atau perantara) dan pihak yang dikorbankan (rakyat), mekanisme keuangan politik menguntungkan keduanya. Bagi politisi Money politic adalah media instan untuk mendapatkan suara konstituen. Namun, bagi mereka yang terlibat dalam politik uang, itu seperti bonus rutin selama pemilu yang lebih nyata dibandingkan dengan program yang dijanjikan. Hal inilah yang menjadi ironi dari politik uang di masyarakat (Ratnasari, 2016). Dalam kajian penelitian sebelumnya perilaku money politic membahas bagaimana dampak sosial dan mencederai nilai demokratis yang berintegritas tanpa jual beli suara (Padilah & Irwansyah, 2023). Tetapi dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji hal yang bertentangan dalam diri penerima money politic serta dampak secara individu terhadap penerima dan bagaimana cara mengatasi dalam kondisi sebagai

penerima money politic, dimana penerima menganggap money politic merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan integritas nilai politik itu sendiri (Ratnasari, 2016). Penelitian ini mempelajari motivasi tambahan yang umum dalam mengubah preferensi, yaitu keinginan untuk konsisten dengan tindakan seseorang. Menurut teori disonansi kognitif, manusia memiliki dorongan tak sadar untuk menyesuaikan preferensi yang ada agar selaras dengan tindakan mereka (Leon, 1957).

Teori disonansi kognitif, pertama kali diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957, Festinger & Carshmith (1959) menyatakan bahwa ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau perilaku mereka, mereka akan merasa tidak nyaman atau tidak tenang. Hal ini dapat menciptakan konflik batin karena tindakan tersebut tidak konsisten dengan keyakinannya. Adapun nilai moral dari integritas demokrasi yang bersih tanpa money politic dan tindakan menerima uang misalnya menerima uang dalam konteks politik seringkali terkait dengan praktik yang dianggap tidak etis atau korupsi (Padilah & Irwansyah, 2023). Individu yang mengalami disonansi semacam ini dapat merasa bersalah atau bingung karena tindakan mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka. Teori dari Festinger ini sangat membantu menjelaskan dan memberikan pengetahuan tentang penerima money politic terkhusus dalam bidang psikologi sosial bahwa perilaku yang tampaknya tidak dapat dipahami atau tidak logis dapat disebabkan oleh dorongan kognitif untuk menjauhi disonansi, atau kontradiksi internal (Morvan et al., 2017)

Faktor di balik penerimaan money politic juga dapat memengaruhi tingkat disonansi kognitif (Alexandre & David C, 2022). Jika seseorang menerima uang karena kebutuhan mendesak atau sebagai kompensasi dari money politic, tetapi sadar bahwa hal itu melanggar nilai demokrasi, maka ia mungkin mencari alasan sendiri untuk membenarkan tindakannya ini menunjukkan adanya inkonsistensi logika dalam berpikir (Festinger, 1962). Nilai budaya memengaruhi cara seseorang berpikir, karena budaya daerah membentuk pandangan terhadap suatu perilaku. Misalnya, jika suatu budaya menganggap money politic sebagai tindakan tidak terpuji, maka individu yang menjunjung nilai etika tinggi bisa mengalami konflik moral saat menerimanya (Cooper, 2019).

Disonansi kognitif didefinisikan sebagai tekanan mental yang disebabkan oleh adanya kognisi atau perasaan yang bertentangan secara bersamaan (Festinger, 1962). Dimana dalam konteks politik seseorang mengalami pertentangan antara keyakinan, nilai-nilai, atau sikap yang bertentangan dengan tindakan menerima uang tersebut (Satya et al., 2022). Dalam konteks ini, disonansi kognitif mengacu pada perasaan ketidaknyamanan atau konflik psikologis yang dapat timbul karena tindakan penerimaan uang politik bertentangan dengan nilai-nilai politik, etika pribadi, atau keyakinan moral individu (Festinger, 1962a). Dalam beberapa kasus, penerima money politik mungkin telah memahami dampak negatif dari praktik politik uang pada sistem politik dan masyarakat, tetapi mereka tetap menerima uang tersebut karena alasan-alasan tertentu, seperti kebutuhan finansial (Eza et al., 2021). Hal ini dapat menciptakan disonansi kognitif antara pemahaman mereka tentang politik dan tindakan nyata mereka. Menurut Leon (1957) dalam buku *a theory of cognitive dissonance* tiga pendekatan untuk mengurangi disonansi yaitu perubahan elemen tingkah laku, perubahan elemen kognitif lingkungan, dan penambahan elemen kognitif baru. Mengubah tingkah laku, tindakan akan dilakukan ketika ada disonansi antara komponen pengetahuan tentang aspek lingkungan dan tingkah laku. Metode ini sendiri sering digunakan dilakukan untuk mengurangi disonansi kognitif seperti individu yang mengalami disonansi kognitif mungkin melakukan upaya kognitif untuk menguranginya (Shaw & Costanzo, 1982). Disonansi kognitif pada penerima money politic dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam proses politik, dapat menciptakan stres atau kecemasan, dan dapat memiliki dampak emosional yang signifikan (Harmon-Jones & Mills, 2019). Memahami dinamika ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami bagaimana politik uang memengaruhi individu secara psikologis dan dapat membantu dalam merancang pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi politik uang.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Neuman (2014) menjelaskan bahwa setiap penelitian sosial ilmiah mengumpulkan dan menganalisis data empirik melalui metode majemuk seperti wawancara, survei, dan etnografi. Metode kualitatif mengolah data tanpa statistik. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post

positivisme dengan kondisi obyek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil, teknik pengumpulan data bersifat gabungan (data kuantitatif dan kualitatif) berjenis analisis induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih menitik beratkan pada makna dari pada generalisasi pada obyek penelitian. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif (Neuman, 2014). Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. Analisis data Penelitian ini melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode Grounded Theory yaitu analisis data yang menggunakan coding atau biasa disebut open coding. Open coding bersifat deskriptif, yaitu mewakili nama, identitas, dan fenomena yang tertulis dalam teks (Corbin & Strauss, 1990). Grounded Theory berguna untuk penelitian tentang fenomena yang bersifat kontekstual, berorientasi pada proses, dan deskriptif. Grounded Theory memberikan prosedur yang mudah dalam analisis dengan demikian, penelitian ini hanya mampu merumuskan temuannya tetapi dapat menunjukkan bukti pendukung dari data secara akurat. Kredibilitas ilmiah teori yang dihasilkan Grounded Theory menjadi lebih kuat karna di dukung oleh data (Ullrich & Poß-Doering, 2023)

Tahapan selanjutnya di dalam coding adalah interpretasi atas kode yang di hasilkan proses open coding. Tahapan ini disebut selective coding (Heath & Cowley, 2004). Aktivitas utama di tahapan ini adalah membangun konsep-konsep yang yang dapat menjelaskan interaksi antar berbagai kategori (kode) yang ada. Penelitian ini melakukan tahap secara iterative dan membandingkan konsep, kategori, dan penjelasan teoritis dengan data. Dalam Grounded theory adanya pembentukan teori dan penentuan teori atau theoretical coding. Tujuan utama tahap ini adalah membuat pernyataan yang sifatnya menyimpulkan atau prediktif atas suatu fenomena. Secara eksplisit penelitian ini menyatakan hubungan sebab akibat (kausal) antara konteks dan konsep. Teori yang muncul

kemudian dibandingkan dengan data dan teori yang relevan (Corbin & Strauss, 2008).

Adapun gambaran Subjek yaitu inisial AN yang berumur 20 tahun, sebagai Mahasiswa Universitas yang bertempat di Surabaya. Pelaksanaan wawancara Subjek inisial AN dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024 jam 18.27 WIB bertempat di warkop Ramonez Surabaya, Subjek berinisial MF umur 27 tahun memiliki pekerjaan kerja serabutan, subjek MF pernah memiliki pengalaman saat menerima money politic di daerahnya saat momen pemilihan kepala desa dan bupati di domisilinya, pelaksanaan pengambilan data wawancara subjek MF dilaksanakan di Warkop Songdji Surabaya pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2024 untuk tanggal 4 bertepatan pukul 15.00 WIB dan tanggal 5 pukul 09.30 WIB dengan 2 sesi wawancara, untuk subjek ke 3 yang terakhir berinisial IR umur 25 tahun pekerjaan freelance, memiliki pengalaman menerima money politic. Pelaksanaan wawancara subjek IR dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 oktober 2024 pengambilan data wawancara diadakan di warkop Jokopi surabaya dengan 2 pertemuan tanggal 6 pukul 13.27 WIB dan tanggal 7 pukul 21.00 WIB.

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data. Menurut Assyakurrohim et al. (2022) Wawancara adalah jenis diskusi yang berfokus pada masalah tertentu yang terdiri dari proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara fisik oleh dua orang atau lebih. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur. Wawancara ini dimulai dengan pertanyaan yang tercantum dalam pedoman wawancara (Sarosa, 2017). Peneliti juga mengharapkan wawancara dalam penelitian ini menjadi wawancara mendalam atau biasa disebut dengan (in-depth interview) Wawancara mendalam adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Wawancara ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, yang melibatkan informan dan pewawancara dalam interaksi sosial (Smith, 2009). Proses wawancara ini terlibat dalam hubungan sosial yang relatif lama antara pewawancara dan informan Peneliti berusaha untuk mengembangkan pedoman wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian (Bell et al., 2023). Dalam penelitian ini, analisis tematik juga dikenal sebagai analisis tematik interpretative adalah teknik analisis data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis

tematik menghasilkan metode untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan melaporkan pola (tema) yang ditemukan dalam data yang dikumpulkan. peneliti harus menulis kode untuk menata ulang dan menempatkannya ke dalam kode, yang merupakan bagian paling penting dari analisis tematik (Liamputtong, 2020).

Dalam penelitian ini, analisis tematik dilakukan melalui teknik analisis data tematik dengan pendekatan yang digerakkan oleh theory driven. Dalam pendekatan ini, tema dibangun dengan indikator atau elemen yang mendukung teori. Peneliti menggunakan koding induktif untuk data kualitatif awal. Peneliti akan mengumpulkan semua data secara sistematis, melakukan pengelompokan setelah itu, membuat tema dan kode untuk mengelompokkan data, dan kemudian peneliti akan menginterpretasikan temuan dan membuat kesimpulan (Liamputong, 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerima money politic merasionalkan atau membenarkan tindakannya

Pembahasan ini didasarkan pada gagasan bahwa dua kognisi bisa relevan atau tidak relevan satu sama lain (Festinger, 1962b) Kognisi tersebut dapat berupa perilaku, persepsi, sikap, emosi, dan keyakinan. Seringkali, salah satu kognisi yang dimaksud adalah tentang perilaku kita. Jika kognisi tersebut relevan, maka kognisi dapat saling sependapat (konsisten) atau berselisih (tidak konsisten) satu sama lain. Hal ini dijelaskan subjek keseluruhan, menerima money politic adalah suatu hal wajar bahwa menerima money politic merupakan cara memenuhi kebutuhan bagi subjek, akan tetapi bertentangan dari keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki subjek dimana subjek menganggap bahwa money politik adalah mencederai nilai-nilai demokrasi dan integrasi politik yang jujur dan adil tanpa jual beli suara hal ini yang dijelaskan IR dan AN yang pernah menerima money politic "Tau kok mas, kalau itu hal yang tidak baik dan sosialisasi saya sering mendengarkan apalagi kampung sini pasti dengar. Saya kadang ya ingin memilih sesuai hati Nurani saya mas mas tapi kembali lagi saya tidak punya pekerjaan yang tetap dan saya freelance. ya lumayan dapatnya di serangan fajar itu" IR61023:24, "Ya jelas dan sebenarnya

masalah nilai itu dari pelajaran sekolah dulu. Katanya pemilu itu berhak bebas memilih saya, jadi yang waktu saya rasakan itu apa boleh seperti ini? apa boleh memilih kandidat yang nggak sesuai dengan saya mau hanya karena uang. Serta realitanya kan saya soalnya juga nggak mikir apa yang terjadi di masa depan jadi saya milih siapa saja nanti nggak masalah. Saya juga yang ada di depan saya uang ya saya terima." AN31023:26 akan tetapi subjek MF menganggap menerima money politic adalah hal yang lumrah dan wajar-wajar saja karena lingkungannya sudah terbiasa dalam penerimaan money politic "itu juga kayaknya gak ada hukumnya itu ada pidananya kayaknya gak ada orang yang dipenjara gara-gara menerima itu kalau tahu mungkin ada hukumnya pasti yang disalahkan ya yang kasih duit bukan saya jadi saya tidak takut" MF041023:36.

2. Faktor-faktor Disonansi kognitif dalam penerimaan money politik

Festinger menyebutkan dua situasi umum yang menyebabkan munculnya disonansi yaitu ketika terjadinya peristiwa atau informasi baru dan seketika sebuah opini atau keputusan, harus dibuat, dimana kognisi dari Tindakan yang dilakukan berbeda dengan opini atau pengetahuan yang mengarahkan ke Tindakan lain (Leon, 1957). Faktor-faktor yang dijelaskan dalam dimensi teori disonansi kognitif adalah inkonsisten logika, opini umum, nilai budaya dan pengalaman masa lalu (Verfuerth et al., 2021). Subjek menjelaskan dalam wawancaranya adanya faktor opini umum menerima money politik berdasarkan kebutuhan ekonomi hal ini di jawab oleh subjek AN "Sebenarnya saya mau nolak karena saya pikirnya pemimpin yang kita pilih bukan main-main. Ini malah merusak masa depan kita semua. Cuma ya gimana saya juga butuh uang karena faktor ekonomi, mau nggak mau ya saya pilih uangnya daripada mikirin masa depan negara yaa meskipun dalam hati saya mengkhianati diri saya sendiri" AN31023:32, Adapun faktor inkonsisten logika menjelaskan menerima money politic adalah hal yang buruk tetapi tetangga dan lingkungan sekitarnya banyak yang menerima "Ya pandangan saya sebetulnya tidak boleh tapi kita harus melihat dari faktor mana untuk saya dan

tetangga sebagai rejeki karena untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Tapi kita paham kok mas kalau itu nggak boleh." IR61023:50 akhirnya subjek IR ikut menerima dan tidak konsisten dalam nilai dan kepercayaan yang dimiliki Subjek IR, sedangkan subjek MF menjelaskan adanya pengalaman masa lalu yang memunculkan kebiasaan menerima money politic meskipun bukan kandidat yang dipilih oleh subjek MF akan tetap mengambil uang dan tidak memilih kandidat yang memberikan uang "waktu pemilu, waktu kecil malah biasanya dapat juga mas makanya saya punya pengalaman yang menganggap kalau menerima uang adalah hal yang wajar-wajar saja, meskipun saat memilih kandidat yang berbeda dari yang memberi saya uang waktu saya sudah umur memilih akhirnya kebawa menjadi kebiasaan mas hehe" MF041023:9

3. Mengatasi Disonansi kognitif dan meningkatkan integritas dalam proses politik

Morvan et al. (2017) mengemukakan tiga cara yang dapat digunakan untuk mengurangi disonansi, yaitu mengubah elemen tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan, dan menambah elemen kognitif baru. Subjek MF dan AN mengambil tindakan dengan tidak menghindari dan merubah tingkah lakunya karena menganggap money politic adalah hal yang wajar disebabkan penerimaan money politic biasa terjadi saat mereka alami disebabkan kebutuhan masyarakat meskipun subjek MF dan AN menyadari hal itu buruk terhadap integritas politik di Indonesia "alasannya ya karena ya pertama ya pasti ini lagi butuh duit terus ya salahnya, aslinya salah cuma gimana namanya orang kepepet itu ya susah mas orang aslinya mereka tidak niat untuk maling itu karena emang pertama ya ada kesempatan dapet money politic oh kesempatan nih saya dapet duit terus kemudian karena emang faktor gak ada uang makanya mereka melakukan kriminal, maling meskipun money politic ini tidak sekriminal maling tapi tetap aja ini bagi saya itu salah criminal" MF051023:118, "Misal saya tau ada orang partai ini terus tiba-tiba mengetuk rumah, ya saya mikir wah bisa jadi ini serangan fajar dan saya menerima" AN31023:104

Sedangkan subjek IR menjelaskan dalam wawancaranya bahwa ingin menghindari dan merasa bersalah jika menerima money politic "Iya, yang seperti saya bilang di lingkungan saya seperti budaya dan kok lama-kelamaan seperti ini ya dan takut merasa bersalah" IR61023:72.

B. Pembahasan

Money politic dapat mengganggu integritas proses Demokrasi dengan mempengaruhi cara individu membuat keputusan politiknya (Artiga González et al., 2024). Salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi selama pemilu adalah banyaknya praktik Money politics (Author & Pye, 1997). Money politic dianggap sebagai praktik yang merusak Demokrasi bahkan pada saat ini Money politic sering terjadi selama masa pemilu (Feinig, 2020). Penelitian menggunakan teori disonansi kognitif ketika seseorang terlibat dalam perilaku yang tidak konsisten dengan keyakinan mereka, seseorang mengalami ketegangan psikologis yang tidak menyenangkan, atau bertentangan dari nilai mereka miliki (Festinger & Carshmith, 1959). Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa bentuk disonansi kognitif yang menjadi alasan mengapa teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku penerimaan money politic. Salah satu contohnya adalah perbedaan antara keyakinan politik dan tindakan menerima uang. Misalnya, seorang individu mungkin mendukung partai atau kandidat yang menentang praktik politik uang, tetapi tetap menerima uang dari mereka. Situasi ini dapat menimbulkan konflik batin karena tindakan tersebut tidak konsisten dengan keyakinan yang dianut. Nilai moral seperti integritas dan demokrasi yang bersih tanpa money politic seringkali bertentangan dengan tindakan menerima uang dalam konteks politik, yang umumnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak etis atau bahkan berkaitan dengan korupsi (Pietryka & DeBats, 2017; Pons, 2018). Individu yang mengalami disonansi seperti ini dapat merasakan perasaan bersalah atau kebingungan karena tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadinya.

Dalam wawancara, subjek AN, IR, dan MF memberikan jawaban yang menunjukkan adanya konflik antara tindakan dan nilai pribadi mereka. Secara umum, mereka menyatakan bahwa menerima money politic adalah tindakan yang wajar dan dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, hal ini bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, di mana mereka menganggap money politic mencederai prinsip demokrasi dan integritas politik yang jujur serta adil, tanpa adanya praktik jual beli suara. Khususnya, subjek IR dan AN mengakui pernah menerima money politic, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai yang mereka pegang. Sementara itu, subjek MF menganggap praktik tersebut sebagai hal yang lumrah dan wajar karena lingkungannya sudah terbiasa dengan penerimaan money politic.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerima money politik dijelaskan melalui pendekatan grounded theory, dengan menggunakan pedoman wawancara dan landasan teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif mencakup dimensi inkonsistensi logika, opini umum, nilai budaya, dan pengalaman masa lalu. Dalam wawancaranya, subjek menjelaskan beberapa faktor yang mendasari penerimaan money politik. Subjek AN mengungkapkan bahwa penerimaan tersebut didasarkan pada kebutuhan ekonomi. Sedangkan faktor inkonsistensi logika dijelaskan oleh subjek IR, yang menyatakan bahwa meskipun menerima money politik adalah hal yang buruk, banyak tetangga dan orang di sekitarnya yang melakukannya, sehingga ia ikut menerima meskipun tidak konsisten dengan nilai dan kepercayaan yang dimiliki. Subjek MF, di sisi lain, menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu memainkan peran penting. Meskipun bukan kandidat yang dipilihnya yang memberikan uang, subjek MF tetap menerima uang tersebut dan tidak memilih kandidat yang memberikannya, menunjukkan kebiasaan yang telah terbentuk dari pengalaman sebelumnya.

Dalam mengatasi disonansi kognitif terkait penerimaan money politic, terdapat tiga cara yang dapat digunakan untuk mengurangnya, yaitu: mengubah elemen tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan, dan menambahkan elemen kognitif baru. Subjek MF dan AN memilih untuk tidak menghindari atau mengubah perilakunya karena menganggap money politic sebagai sesuatu yang wajar. Pandangan ini muncul karena praktik money politic sering mereka alami, terutama saat masyarakat berada dalam kondisi membutuhkan. Meskipun demikian, subjek MF dan AN menyadari bahwa tindakan

tersebut merugikan integritas politik di Indonesia. Sementara itu, subjek IR, dalam wawancaranya, menyatakan bahwa ia berusaha menghindari dan merasa bersalah jika menerima money politic

Pembahasan yang telah di deskripsikan dalam penelitian ini memberikan hasil jawaban ketiga subjek yaitu adanya penerimaan money politic saat momen pemilu disebabkan faktor ekonomi dan lingkungan sekitar yang sering terjadi di lingkungan sebagai penerima money politic, sedangkan secara relevan dan tidak relevan ketiga subjek menyadari bahwa menerima money politik merupakan situasi kebingungan yang dirasakan disebabkan ketiga subjek menyadari money politic adalah Tindakan yang buruk dan merusak integritas demokrasi serta melanggar hukum di Indonesia, akan tetapi ketiga subjek sulit untuk menolak pemberian money politic tersebut. Untuk mengurangi terjadinya disonansi kognitif adanya penghindaran saat momen serangan fajar dalam momen pemilu akan tetapi subjek menjelaskan sulit untuk menghindari disebabkan money politic adalah hal yang sudah terbiasa terjadi di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Disonansi kognitif adalah teori berkaitan dengan dua jenis inkonsistensi perilaku sikap tertentu, yang timbul karena dilakukannya perilaku yang tidak sesuai dengan sikap dan yang timbul karena pengambilan keputusan. Dalam hal terjadinya disonansi maka akan timbul ketegangan psikologis, atau ketidaknyamanan (Morvan et al., 2017). Penelitian ini menggambarkan bahwa praktik money politic masih menjadi fenomena yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya karena faktor ekonomi, budaya, pengalaman masa lalu, dan pengaruh lingkungan sosial. Meskipun para penerima menyadari bahwa tindakan menerima uang dalam konteks politik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan integritas pribadi mereka, tekanan kebutuhan hidup dan normalisasi praktik tersebut di lingkungan sekitar membuat mereka tetap melakukannya.

Melalui pendekatan teori disonansi kognitif Festinger, terlihat bahwa konflik batin yang dialami penerima muncul dari ketidaksesuaian antara nilai yang diyakini dan perilaku yang dilakukan. Tiga cara yang ditemukan untuk mengurangi disonansi

kognitif tersebut adalah: (1) mengubah tingkah laku agar sejalan dengan nilai, (2) mengubah pemikiran agar tidak merasa bersalah, dan (3) menambahkan justifikasi baru untuk merasionalisasi tindakan. Sayangnya, hanya sebagian subjek yang berusaha aktif menghindari praktik tersebut.

B. Saran

Dalam penelitian ini diperlukan peningkatan pendidikan politik, khususnya mengenai nilai-nilai demokrasi, etika pemilu, dan bahaya money politic, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan terlibat karena faktor ekonomi. Dan Penguatan nilai-nilai moral dan integritas harus dilakukan sejak usia sekolah melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan, agar generasi muda lebih memiliki daya tahan terhadap praktik politik yang tidak etis.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexandre, B., & David C, V. (2022). Nouveaux horizons sur la dissonance cognitive : développements récents, modèles intégratifs et pistes de recherche. *L'année Psychologique/Topics in Cognitive Psychology*, 122, 149-183.
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87-98. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>
- Artiga González, T., Capozza, F., & Granic, G. D. (2024). Cognitive dissonance, political participation, and changes in policy preferences. <https://doi.org/10.7910/DVN/XPURU1>
- Assyakurrohimi, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Author, A., & Pye, L. W. (1997). Money Politics and Transitions to Democracy in East. In *Source: Asian Survey* (Vol. 37, Issue 3).
- Bell, J., Lim, A., Williams, R., Girdler, S., Milbourn, B., & Black, M. (2023). 'Nothing about us without us': co-production ingredients for working alongside stakeholders to develop mental health interventions.' *Advances in*

- Mental Health, 21(1), 4–16.
<https://doi.org/10.1080/18387357.2021.2020143>
- Burszty, L., Egorov, G., & Fiorin, S. (2020). From extreme to mainstream: The erosion of social norms. *American Economic Review*, 110(11), 3522–3548.
<https://doi.org/10.1257/AER.20171175>
- Cooper, J. (2019). Cognitive dissonance: Where we've been and where we're going. *International Review of Social Psychology*, 32(1). <https://doi.org/10.5334/irsp.277>
- Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3–21.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Qualitative research. Los Angeles: Techniques and procedures for developing grounded theory.
- Cornelia, G., Roulina Anastasya, T., & Azzariel Priliska, J. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Eza, M., Begouvic, H., & Cuan, B. (2021). MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA. In Eza Helyatha Begouvic SOL JUSTICIA (Vol. 4, Issue 2).
- Feinig, J. (2020). Toward a moral economy of money? Money as a creature of democracy. *Journal of Cultural Economy*, 13(5), 531–547. <https://doi.org/10.1080/17530350.2020.1729223>
- Festinger, L. (1962a). A theory of cognitive dissonance (2nd ed.). Stanford university press.
- Festinger, L. (1962b). Cognitive Dissonance. *Scientific American*, 207(4), 93–106.
- Festinger, L., & Carshmith. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 58(2), 203., 2(58), 203–210.
- Gentzkow, M., & Shapiro, J. M. (2011). Ideological segregation online and offline. *Quarterly Journal of Economics*, 126(4), 1799–1839. <https://doi.org/10.1093/qje/qjr044>
- Hamid, & Edy, S. (2004). *Memperkokoh Otonomi daerah: Kebijakan, evaluasi, dan saran*. UII Press.
- Harmon-Jones, E., & Mills, J. (2019). An introduction to cognitive dissonance theory and an overview of current perspectives on the theory.
- Hartmann, A. J., Gangl, K., Kasper, M., Kirchler, E., Kocher, M. G., Mueller, M., & Sonntag, A. (2022). The economic crisis during the COVID-19 pandemic has a negative effect on tax compliance: Results from a scenario study in Austria. *Journal of Economic Psychology*, 93, 102572. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102572>
- Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss. *International Journal of Nursing Studies*, 41(2), 141–159.
- Leon, F. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: CA: Stanford University Press.
- Lergetporer, P., Schwerdt, G., Werner, K., West, M. R., & Woessmann, L. (2018). How information affects support for education spending: Evidence from survey experiments in Germany and the United States. *Journal of Public Economics*, 167, 138–157. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.09.011>
- Liamputong, P. (2009). Qualitative data analysis: conceptual and practical considerations.. *Health Promotion Journal of Australia*, 20(2), 133–139.
- Liamputong, P. (2020). *Qualitative Research Methods*. Oxford University Press. .
- Morvan, Camille, & O'Connor, A. (2017). *An analysis of Leon Festinger's a theory of cognitive dissonance (1st Edition)*. Macat Library.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., Program, A., & Kenotariatan, S. M. (2020). PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *NOTARIUS*, 13(1).

- Neuman, L. W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Pietryka, M. T., & DeBats, D. A. (2017). It's not just what you have, but who you know: Networks, social proximity to elites, and voting in state and local elections. *American Political Science Review*, 111(2), 360–378. <https://doi.org/10.1017/S000305541600071X>
- Pons, V. (2018). Will a five-minute discussion change your mind? A countrywide experiment on voter choice in France. In *American Economic Review* (Vol. 108, Issue 6, pp. 1322–1363). American Economic Association. <https://doi.org/10.1257/aer.20160524>
- Ratnasari, D. (2016). Hubungan Penerimaan Money Politic dengan Tingkat Partisipasi Politik dalam Pilkadaes HUBUNGAN PENERIMAAN MONEY POLITIC DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4).
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar* (edisi kedua). Penerbit Indeks Jakarta.
- Satya, D., Vina, D. P., Juanrico, A. S. T., Lucky, N., Afifah, Z. D., Heru, P., & Ricky, S. M. (2022). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI* (N. Rismawati, Ed.; 1st ed.). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Shaw, M., & Costanzo, P. (1982). *Theories of social psychology*. McGraw-Hill International.
- Smith, J. A. (2009). *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset*. Pustaka belajar.
- Ullrich, C., & Poß-Doering, R. (2023). *Qualitative Research Methods in Health Services Research*. Heidelberg: Foundations of Health Services Research.
- Verfuerth, C., Gregory-Smith, D., Oates, C. J., Jones, C. R., & Alevizou, P. (2021). Reducing meat consumption at work and at home: facilitators and barriers that influence contextual spillover. *Journal of Marketing Management*, 37(7–8), 671–702. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1888773>
- Yasin, H., & Kadji, J. (2025). Politik Uang dalam Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura: Antara Legitimasi Sosial dan Perilaku Memilih. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 249–261. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10894>
- Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126–142.
- Zen, R. H. (2015). 205-739-1-PB. *AL-'ADALAH*, Vol. XII(3).